

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Menurut hasil dari analisis biro analisa anggaran dan pelaksanaan APBN, industri pariwisata di Indonesia pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan sebesar 9,39% di Indonesia. Angka ini terus mengalami pertumbuhan pada setiap tahun dan dari sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi yang handal. Selain itu, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pendapatan keuntungan negara dan juga daerah (Sismudjito *et al.*, 2018).

Purwahita *et al.*, (2021) menyatakan bahwa pandemi *covid-19* telah memberikan dampak terhadap lingkungan, yang terlihat dari penurunan polusi udara di beberapa kota besar di Indonesia, kondisi udara juga mengalami perubahan karena menurunnya kegiatan manusia. Selain itu, sektor pariwisata juga terdampak oleh penurunan aktivitas perjalanan di berbagai destinasi, termasuk di tempat wisata di berbagai lokasi. Sebagai salah satu industri terbesar di dunia, pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling parah terdampak akibat pembatasan perjalanan dan penyebaran virus. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak yang luar biasa pada sektor pariwisata, baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan perilaku wisatawan. Untuk pulih sepenuhnya, sektor pariwisata memerlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan inovasi dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak serius pada industri pariwisata di Indonesia maupun secara global. Wisatawan mancanegara mengalami penurunan drastis karena adanya pengurangan penerbangan internasional. Sementara itu, wisatawan nusantara juga mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi, dan diperkirakan situasi ini akan semakin memburuk seiring penerapan kebijakan social dan physical distancing. Tidak hanya Indonesia, dampak pandemi juga melanda sektor pariwisata di berbagai belahan dunia. Industri perhotelan, jasa penerbangan, dan angkutan darat serta laut di berbagai negara mencatat penurunan tajam dalam aktivitasnya. Seluruh dunia merasakan dampak ekonomi dari pandemi ini, terutama dalam sektor yang bergantung pada pariwisata. Pemulihan sektor pariwisata akan

menjadi tantangan besar, dan akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan tingkat kunjungan dan kegiatan pariwisata seperti sebelumnya. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengatasi situasi ini dan mencari cara agar pariwisata dapat pulih dengan lebih baik di masa depan (Revindo *et al.*, 2020).

Revindo *et.al.*, (2020) menjelaskan bahwa dampak *covid-19* memberikan pengaruh dalam beberapa sektor perjalanan pariwisata di Indonesia. Dalam data yang dijelaskan bahwa jumlah wisatawan mancanegara menurun tajam pada Februari 2020 sebanyak 500 ribu wisatawan. Tercatat jumlah wisatawan asing turun 29% dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada Februari 2019 yang mencapai sebanyak 1,38 juta orang. Sedangkan data jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2018 tercatat sebanyak 303 juta, dan pada 2019 jumlah wisatawan nusantara ditargetkan hanya sebanyak 275 juta. Hal ini dikarenakan mahalnya tiket pesawat untuk perjalanan domestik.

Perjalanan wisata di dalam negeri Indonesia mengalami pemulihan dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan pada tahun 2022. Jumlah perjalanan wisatawan naik sebesar 19,82% dibandingkan dengan tahun 2021, dan juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,76% dibandingkan dengan tahun 2019. Data jumlah perjalanan wisata nusantara atau perjalanan wisata dalam negeri dapat diperoleh dari data statistik milik instansi Badan Pusat Statistik (Marhaeni, 2023).

Pengaruh perkembangan dan kemajuan wilayah sangat terpengaruh dari kepemimpinan seseorang. Suatu daerah apabila mempunyai pemimpin yang adaptif dan inovatif dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan wilayah tersebut. Berbagai pembangunan dan perencanaan untuk meningkatkan suatu potensi seperti wisata baik budaya maupun alam, mampu memberikan nilai positif bagi kualitas kepemimpinan seseorang. Tentu dalam merencanakan suatu hal yang digunakan untuk meningkatkan kualitas wilayah harus berkesinambungan satu sama lain. Pemerintah daerah mempunyai peran penting bersama dengan masyarakat sekitar sebagai pendorong dan penyempurnaan suatu upaya tersebut.

Reyog Ponorogo merupakan suatu bentuk seni pertunjukan yang memiliki relevansi dengan kehidupan sosial, baik pada masa lalu maupun masa kini. Seni Reyog Ponorogo dapat dianalisis dari berbagai perspektif, seperti seni visual, tari, filsafat, fungsi, dan lain sebagainya. Dengan ciri khasnya berupa dadak merak yang berukuran besar, beberapa komponen yang terdapat di tari reyog Ponorogo seperti jathil, ganong,

klonosewandono, warok, dan lainnya yang juga memiliki alur cerita unik. Cerita reyog tersebut memberikan beberapa persepsi bagi masyarakat yang menikmatinya. Reyog Ponorogo merupakan suatu budaya unggulan di Kabupaten Ponorogo karena mampu menarik wisata daerah maupun luar daerah untuk datang menyaksikan budaya tersebut.

Reyog Ponorogo merupakan sebuah seni budaya dari Ponorogo yang telah diakui sebagai salah satu seni pertunjukan asli oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*). Secara keseluruhan, seni tersebut merupakan bagian dari kekayaan budaya Jawa yang kaya akan nilai-nilai *adiluhung* atau keutamaan. Keterlibatan masyarakat Ponorogo dengan budaya reyog memiliki tanggung jawab agar bisa saling melestarikan dan menghidupkan budaya tersebut, dan seni reyog juga menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Oleh karena itu, masyarakat Ponorogo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keindahan seni Reyog tersebut dengan melestarikan budaya reyog dalam berbagai acara maupun event rutin di daerahnya (Achmadi, 2016).

Pertumbuhan produk pariwisata dapat direncanakan secara bertahap sesuai dengan pertimbangan kapasitas masyarakat, kemampuan pemerintah daerah, dan keuletan pelaku usaha dalam mengenali serta mengelola potensi pariwisata menjadi produk yang bernilai. Ini berarti pengembangan produk pariwisata tidak akan dilakukan secara besar-besaran dan dengan perubahan yang banyak, melainkan akan dijalankan dengan hati-hati dan secara bertahap. Prioritas pengembangan ditetapkan dengan dukungan program dan kegiatan konkret yang terencana dengan baik. Nilai kesenian Reyog dapat dikaji lebih lanjut untuk menjadi bahan pengembangan nilai budaya Reyog (Simamora *et al.*, 2016).

Kebijakan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata harus diantisipasi dengan baik agar tetap berada pada jalur yang sesuai dan tetap memperhatikan daya dukungnya. Pembangunan di wilayah objek wisata akan memberikan kontribusi yang signifikan jika dikelola secara profesional. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi daerah terkait, dan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut (Simamora *et al.*, 2016).

Kebijakan yang telah diterapkan oleh beberapa bupati di Ponorogo memberikan dampak yang diterima pada masa periodenya, baik kepada masyarakat maupun luar

daerah Ponorogo. Kebijakan Bupati pada sebelumnya berbeda dengan kebijakan bupati sekarang. Namun dari kebijakan yang berbeda, pasti ada tujuan sendiri mengapa kebijakan itu diciptakan.

Perbedaan kebijakan bupati dilakukan secara signifikan pada setiap periodenya dengan memanfaatkan peluang wilayah maupun ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Bupati Ipong saat menjabat mulai tahun 2016-2021, dimana pada tahun tersebut Bupati Ipong mempunyai cara sendiri untuk membangun budaya Reyog sebagai wisata *local wisdom* di Ponorogo. Bupati Ipong melakukan beberapa kebijakan yang dirancang untuk melestarikan budaya Reyog kepada masyarakat Ponorogo dalam bentuk pembangunan dan pelestarian Reyog oleh Bupati Ipong, yang selalu melibatkan masyarakat untuk menciptakan kearifan lokal dan mampu memberikan kepuasan bagi pengelola Reyog/pelaku budaya Reyog, maupun masyarakat Ponorogo sebagai penikmat budayanya.

Kebijakan Bupati Ipong dalam membangun wisata budaya Reyog dilakukan dengan membuat kebijakan rutin pada tanggal 11 setiap bulan. Kebijakan ini dimulai pada tahun 2019, sesuai dengan instruksi yang tertera dalam surat perintah bernomor 556/572/405.08/2019 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Ponorogo (Sahri, 2021). Perintah ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah Ponorogo agar kesenian Reyog tidak punah dan ada penerus keseniannya pada setiap daerah. Upaya pembangunan dan keterlibatan serta partisipasi dari masyarakat Ponorogo, bupati Ipong lebih berfokus pada bagian promosi dan peningkatan kesenian Reyog dengan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk melestarikan *culture* kesenian reyog pada kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat Ponorogo bisa berpartisipasi dalam melestarikan Reyog dan tidak hanya masyarakat namun beberapa komunitas Reyog di Ponorogo juga ikut serta dalam kebijakan ini. Kebijakan ini difokuskan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebudayaan Reyog.

Dalam masa kepemimpinan Ipong saat menjabat Bupati Ponorogo, Ipong memberikan respon kepada masyarakat Ponorogo yang merasa tidak puas terhadap kebijakan Bupati yang hanya menganggap budaya Reyog Obyog tidak diberikan rumah pentas atau panggung pada saat *event* tertentu seperti Festival Nasional Reyog Ponorogo (FNRP). Menjawab keluhan tersebut, maka dilaksanakan Reyog Obyog di setiap kelurahan dan desa pada tanggal 11 setiap bulan adalah sebuah strategi untuk mengembalikan popularitas Reyog Obyog di kalangan masyarakat secara luas. Selain

itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para seniman Reyog Obyog yang berada di desa-desa, karena mereka akan mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam setiap acara (Harsono *et al.*, 2022)

Berbanding dengan masa kepemimpinan Bupati Sugiri saat ini, budaya Reyog Ponorogo lebih fokus terhadap pembangunan daerah dalam bentuk monumen sebagai *icon* di sudut-sudut kabupaten Ponorogo sendiri. Bupati Sugiri banyak memberikan perubahan seperti *face off* beberapa ruas jalan yang ada di sekitar pusat kota, seperti perubahan jalan Sokarno hatta yang sekarang berubah menjadi Jalan Hos. Cokroaminoto, melakukan *face off* di jalan Urip Sumoharjo dan jalan Jenderal Sudirman. Selain melakukan *face off* di beberapa titik, kepemimpinan Sugiri saat ini juga memberikan pembangunan dalam bentuk monumen lain seperti Monumen Reyog Sampung (MRP) yang berada di daerah Sampung Ponorogo. Monumen ini diupayakan oleh Bupati Ponorogo sebagai peningkatan sektor ekonomi wilayah Sampung tersebut dan juga memberikan pengembangan Kabupaten Ponorogo dalam bentuk kesenian fisik yang dapat mendatangkan wisata domestik maupun mancanegara.

Pada hari jum'at tanggal 3 Maret 2023, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengunjungi lokasi pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) Ponorogo yang terletak di Penambangan Batu Kapur di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Pembangunan MRMP telah dimulai sejak akhir tahun 2022 dan diharapkan selesai menjadi kawasan wisata terintegrasi menjelang akhir tahun 2024. Dengan tinggi mencapai 126 meter, MRMP diharapkan akan menjadi daya tarik wisata baru dan menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat Ponorogo. Monumen ini akan menjadi yang tertinggi, melebihi ketinggian patung GWK Bali yang hanya mencapai 121 meter. Selain pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) itu sendiri, kawasan di sekitarnya juga tengah dikembangkan untuk menunjang pariwisata. Rencananya, akan dibangun hotel, restoran, dan wahana wisata di sekitar MRMP yang diharapkan dapat menarik perhatian dari turis internasional, sehingga resonansinya berpotensi mendunia (Handayani, 2023).

Gubernur Khofifah memandang bahwa berdirinya Monumen Reog ini akan membuka peluang besar bagi sektor pariwisata. Peralnya, MRMP akan terkoneksi dengan banyak daerah wisata pendukung lainnya, seperti wisata Sarangan dan Tawangwangu. Keterhubungan antara berbagai destinasi wisata ini diharapkan akan meningkatkan potensi pasar dan daya tarik bagi pariwisata di Jawa Timur, dan

berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesadaran akan kekayaan budaya daerah.

Masa kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita ini mengusung visi dan misi “Nawa Dharma Nyata”, yang bertujuan untuk mewujudkan Pertanian Hebat, Pendidikan Hebat, Kesehatan Hebat, Perempuan Hebat, Seni Budaya dan Pariwisata Hebat, Pemuda Olahraga Hebat, UMKM Hebat, serta Pemerintah Amanah. Prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan dengan peningkatan infrastruktur perkotaan yang menarik. Meskipun APBD telah disahkan dan mengalami pergeseran fokus untuk penanganan pandemi Covid-19 pada awal masa jabatan, Bupati Sugiri Sancoko-Wabup Lisdyarita berhasil memotivasi masyarakat dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam melaksanakan perbaikan pejalan kaki di Jalan HOS Tjokroaminoto pada tahun 2021 (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, 2023).

Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia, pemerintah memandang sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang akan tumbuh dengan cepat sesuai dengan visi "Nawa Cita" Presiden RI. Pariwisata diharapkan menjadi lokomotif dalam meningkatkan penerimaan keuntungan pendapatan negara maupun daerah, mengembangkan usaha, membangun infrastruktur, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah mengakui perlunya pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap kawasan pariwisata. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya, sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan dalam mengunjungi berbagai destinasi pariwisata di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan pariwisata dapat berkembang dengan lebih baik, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Moerwanto & Junoasmono, 2017).

Di penelitian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang akan dipaparkan pada penelitian kali ini akan ada pembeda dari peneliti-peneliti lainnya. Penelitian terdahulu membantu peneliti menyusun kerangka teoritis yang kuat untuk penelitian mereka. Kerangka teoritis ini menjadi landasan teoritis yang mengarahkan analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

Penelitian pertama, menurut Anwar *et.al.*, (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi pengembangan wisata berbasis kearifan lokal Di Kalimantan Selatan”, membahas mengenai upaya pengembangan wisata yang berbasis kearifan lokal yang dimana strategi yang dilakukan berupa menganalisis kebijakan dari pemerintah maupun permasalahan yang juga dari masyarakat. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis berupa pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan dan menginterpretasikan semua data dan informasi yang diperoleh di lapangan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail dan mendalam tentang fenomena yang diteliti serta memberikan interpretasi yang komprehensif terhadap data yang dikumpulkan. Sebuah perencanaan akan menghasilkan pengembangan yang baik jika dilakukan dengan pemahaman menyeluruh terhadap semua elemennya. Untuk menggambarkan semua elemen dalam pariwisata desa, dapat dilakukan pendekatan dengan menggunakan elemen dan sistem pariwisata. Pada dasarnya, setiap bentuk pengembangan pariwisata bergantung pada dua elemen utama, yaitu produk (destinasi) dan pasar wisata (pasar). Elemen-elemen produk pariwisata, seperti infrastruktur, fasilitas, utilitas, kelembagaan, sumber daya manusia, lingkungan, serta pasar wisata dan promosi wisata, harus dikembangkan secara komprehensif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Jupir (2013) yang penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan aspek-aspek implementasi seperti Partisipasi, Jejaring, Struktur Keorganisasian, aktor, finansial, fasilitas, kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kepentingan stakeholder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Menurut teori ini, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya pendukung implementasi belum dialokasikan dengan jelas, komunikasi dan koordinasi belum berjalan optimal, dan kondisi eksternal (sosial, ekonomi, dan politik) menghambat implementasi kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat secara efektif dan optimal. Implikasinya adalah bahwa kegiatan pariwisata berbasis kearifan lokal belum memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dari segi ekonomi.

Penelitian yang ketiga, menurut Prayudi Agus M (2020) dalam penelitiannya memaparkan bahwa pariwisata memiliki dampak positif dalam upaya pelestarian

budaya dan adat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, kesehatan jasmani dan rohani, serta mengurangi konflik sosial. Selain itu, pariwisata juga memberikan manfaat lingkungan dengan mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi. Dalam skala yang lebih luas, pariwisata juga memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mempercepat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa memiliki dan cinta terhadap tanah air, serta memelihara hubungan yang baik antara daerah, suku, dan negara.

Penelitian yang keempat menurut Rasyid Ohorella & Prihantoro (2021) dalam penelitiannya membahas mengenai konteks pariwisata di Maluku, branding kearifan lokal dilakukan melalui konsep *The Spice Islands* sebagai pintu masuk untuk pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Namun, secara keseluruhan, pengembangan aspek kearifan lokal masih kurang optimal. Padahal, Maluku memiliki kekayaan adat istiadat, budaya, kesenian, tradisi, dan kebiasaan yang sangat unik dan khas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya menonjolkan dan mengkreasikan budaya lokal yang kaya di Maluku agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam sektor pariwisata. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Selain itu, peneliti juga menggunakan data dari dokumentasi untuk memperkaya informasi yang diperoleh.

Penelitian terdahulu yang kelima, menurut Darussalam *et.al.*, (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan manajemen pariwisata halal berbasis kearifan lokal Sipakatau’, Sipakainge’, Sipakalebbi” memaparkan tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sasaran utama dan mendukung industri ekonomi kreatif di sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan juga memiliki potensi alam yang indah sebagai destinasi pariwisata. Konsep pariwisata halal tidak hanya didasarkan pada tempat-tempat yang memiliki nuansa religius, tetapi juga melibatkan rekonstruksi kawasan pariwisata dengan prinsip syariah serta memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat adat yang perlu dilestarikan.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai upaya para peneliti dalam mencari perbandingan dan sebagai sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian dahulu ialah mengenai penelitian yang melibatkan dua aktor penting di Kabupaten Ponorogo yaitu Bupati Ipong Muchlisoni



dan Bupati Sugiri Sancoko. Selain dua aktor tersebut, pada penelitian ini juga mempunyai *novelty* pada penelitian tentang kebijakan kepemimpinan dan inovasi kebijakan publik di Kabupaten Ponorogo pada masa Bupati Ipong Muchlisoni dan Bupati Sugiri Sancoko.

Pada topik penelitian ini akan mengambil permasalahan yang akan diteliti dan dijelaskan mengenai perbandingan kebijakan dari Bupati di Kabupaten Ponorogo pada era kepemimpinan Bupati Sugiri dan Ipong Muchlisoni. Kebijakan ini sudah banyak dilaksanakan mulai dari kepemimpinan bupati Ipong dahulu saat menjabat yang berfokus pada pembangunan *culture* masyarakat terhadap Reyog Ponorogo, baik Reyog Festival maupun Reyog Obyog. Sedangkan pada masa kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko ini lebih berfokus pada pembangunan dalam bentuk fisik sebagai *icon* Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya perbedaan kepemimpinan dari kedua pemimpin Kabupaten Ponorogo, maka dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana perbedaan kebijakan pembangunan wisata di Ponorogo dan apa yang mempengaruhi kedua pemimpin tersebut menciptakan kebijakan yang saling berbeda sisi pembangunannya.

## **1.2 PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu, “Bagaimana perbandingan antara Bupati Ipong Muchlisoni dan Bupati Sugiri Sancoko dalam kebijakan kepemimpinan dan inovasi kebijakan publik terhadap pembangunan wisata Kabupaten Ponorogo berdasarkan budaya Reyog Ponorogo?”

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

- 1.3.1** Memahami kebijakan kepemimpinan dan inovasi kebijakan publik di era Bupati Sugiri Sancoko berdasarkan pembangunan wisata di Kabupaten Ponorogo berdasarkan budaya Reyog Ponorogo
- 1.3.2** Memahami kebijakan kepemimpinan dan inovasi kebijakan publik di era Bupati Ipong Muchlisoni berdasarkan pembangunan wisata di Kabupaten Ponorogo berdasarkan budaya Reyog Ponorogo
- 1.3.3** Memahami bentuk perbandingan kebijakan kepemimpinan dan inovasi kebijakan publik di era Bupati Sugiri Sancoko dan Bupati Ipong Muchlisoni berdasarkan pembangunan wisata di Kabupaten Ponorogo berdasarkan budaya Reyog Ponorogo

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini mempunyai dua manfaat yang terbagi dalam manfaat secara teoritis dan secara praktis.

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kebijakan kepemimpinan serta inovasi kebijakan publik di era Bupati Sugiri Sancoko dan Bupati Ipong Muchlisoni. Selain itu, dari penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi wawasan baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis untuk dapat dipelajari saat masa perkuliahan.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan sarana dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam perencanaan kebijakan yang bisa diterapkan selanjutnya. Dari penelitian ini diharapkan juga bisa digunakan untuk bahan menganalisa kebijakan-kebijakan Bupati untuk Kabupaten Ponorogo dalam segi keefektifan maupun juga efisiensi kebijakan itu terlaksana.

## **1.5 PENEGASAN ISTILAH**

### **1.5.1 *Local Wisdom***

*Local Wisdom* merupakan budaya kearifan lokal yang dimana budaya maupun wisata tersebut berasal dari suatu daerah. Menurut Anwar *et.al.*, (2018), kearifan lokal dalam praktiknya merujuk pada pengetahuan yang berasal dari budaya masyarakat lokal dan diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, kesehatan tradisional, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan lain di dalam komunitas. Salah satu bentuk dari kearifan lokal adalah pengetahuan lokal, yang merupakan konsep yang berakar dari pengalaman masyarakat lokal. Konsep ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu: (1) menjadi milik lokal; (2) meningkatkan kehidupan dalam konteks ekologi; (3) terkait dengan semua hubungan kehidupan dalam alam semesta; (4) didasarkan pada prinsip moral yang berasal dari pengetahuan lokal; (5) menyangkut kehidupan pribadi manusia yang berada dalam komunitas adat.

### **1.5.2 Bupati Ipong Muchlisoni**

Bupati Ipong Muchlisoni menjabat sebagai Bupati Kabupaten Ponorogo mulai dari tahun 2016-2021. Berbagai kebijakan publik dimasa kepemimpinannya telah terlaksana dengan penilaian yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya maupun sesudahnya. Saat Ponorogo dalam masa kepemimpinan Ipong ini telah dilaksanakan kebijakan-kebijakannya, seperti pembangunan jalan, fokus terhadap produktivitas sektor pertanian dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (RTLH), menyelesaikan pembangunan gedung Sentra Industri UMKM dan pembangunan renovasi Pasar Legi.

Bupati Ipong telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya Reyog bagi masyarakat Ponorogo melalui upaya pembangunan dan pelestarian kesenian. Bupati Ipong selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kearifan lokal serta memberikan kepuasan bagi pengelola Reyog dan para pelaku budaya Reyog, serta memberikan kebanggaan bagi masyarakat Ponorogo sebagai penikmat budayanya.

### **1.5.3 Bupati Sugiri Sancoko**

Bupati Sugiri Sancoko menjadi Bupati Ponorogo dimulai pada tahun 2021-sekarang. Dalam 2 tahun kepemimpinannya ini sudah memberikan kontribusi baik berfokus pada pembangunan infrastruktur daerah, perombakan sebagian jalan poros di pusat Kabupaten Ponorogo, pembangunan wisata yang lebih berinovasi seperti air mancur telaga Ngebel, Monumen Reyog Ponorogo (MRP) di Sampung, dan beberapa program lainnya.

Pada masa Bupati Sugiri ini juga memberikan kontribusinya dalam pengembangan kesenian Reyog Ponorogo, baik Reyog Dadak maupun Reyog Obyog. Beberapa event dilakukan agar kesenian ini terus dilestarikan oleh masyarakat Ponorogo terutama yang berusia remaja. Berbeda dengan kepemimpinan Ipong sebelumnya, Bupati Sugiri Sancoko mengusung pembangunan dan pengembangan kesenian reyog Ponorogo dalam bentuk fisik yang bernilai sebagai *icon*-nya Kabupaten Ponorogo. Kebijakan Sugiri ini mempunyai tujuan tertentu dalam pengimplementasiannya. Reyog Ponorogo lebih digadangkan pada masa Sugiri ini, sehingga pengajuan Reyog sebagai

Warisan Budaya Tak Benda telah diajukan kepada UNESCO pada tanggal 18 Februari 2022 (Febriantini et al., 2022).

#### **1.5.4 *Nawa Dharma Nyata***

Masa kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita ini mengusung visi dan misi “Nawa Dharma Nyata”, yang bertujuan untuk mewujudkan Pertanian Hebat, Pendidikan Hebat, Kesehatan Hebat, Perempuan Hebat, Seni Budaya dan Pariwisata Hebat, Pemuda Olahraga Hebat, UMKM Hebat, serta Pemerintah Amanah. Pentingnya meningkatkan infrastruktur perkotaan yang menarik telah menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Meskipun APBD mengalami pergeseran fokus untuk penanganan pandemi Covid-19 pada awal masa jabatan Bupati Sugiri Sancoko-Wabup Lisdyarita, mereka berhasil memotivasi masyarakat dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam merenovasi trotoar di Jalan HOS Tjokroaminoto pada tahun 2021.

#### **1.5.5 *Nawa Cita***

*Nawa Cita* merupakan upaya yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dalam tujuannya untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan bermartabat. Program Nawacita dianggap sebagai dasar utama untuk mereformasi pembangunan Indonesia. Program ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi sambil menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan transparansi dalam kinerja pemerintah yang dapat diawasi oleh rakyat (Purnama & Bestari, 2021).

Dengan *Nawa Cita* sebagai upaya pemerataan ekonomi yang akan diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan di Indonesia. Untuk mensukseskan program *Nawa Cita* ini haruslah mempunyai dukungan dari pemerintah daerah maupun juga provinsi untuk mengimplementasikan program tersebut.

#### **1.5.6 *Reyog Obyog***

Reyog Obyog adalah sebuah kesenian tradisional yang memiliki nilai hiburan tinggi, sangat merakyat, dan tidak terikat oleh aturan yang ketat. Kesenian ini ditandai oleh ekspresi yang terbuka bahkan "bebas," yang pada satu sisi membuatnya tetap kuat dan tidak pernah surut oleh berbagai kondisi. Bahkan, Reyog menjadi model pelestarian yang paling diandalkan dalam

tradisi Reyog Ponorogo karena diupayakan, didukung, dilestarikan, dan dikembangkan oleh komunitas yang berkomitmen terhadap kesenian ini.

Reyog Obyog yang lahir dan berkembang di bawah kreasi nenek moyang Ponorogo, tidak dianggap asli dan tidak memiliki makna yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan dua binatang buas sebagai alat utama dalam kesenian ini, yang keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Ini memberikan gambaran yang jelas bahwa pemilihan komponen standar Reyog Ponorogo tidak hanya didasarkan pada naluri seni nenek moyang mereka, tetapi juga terkait dengan keyakinan dan konteks budaya yang melatarbelakangi kesenian tersebut (Nurul Iman, Sigit Dwi Laksana, 2021).

#### **1.5.7 Monumen Reyog Ponorogo (MRP)**

Kawasan Monumen Reyog dan Museum Peradaban di Bukit Gamping, wilayah Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, telah dijadikan sebagai destinasi wisata yang menarik. Monumen Reyog dan Museum Peradaban merupakan bagian dari kawasan wisata ini, yang menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung. Monumen Reyog adalah simbol dari warisan budaya dan kesenian Reyog Ponorogo yang telah menjadi identitas daerah tersebut. Monumen ini berfungsi sebagai pengingat dan perayaan atas keberagaman seni dan budaya yang ada di Ponorogo. Pengunjung dapat menikmati pertunjukan tari Reyog yang megah dan berkesan di sekitar monumen ini.

Di sisi lain, Museum Peradaban menyajikan informasi dan artefak sejarah yang mencakup berbagai aspek budaya, tradisi, dan peradaban masyarakat Ponorogo. Museum ini memberikan wawasan mendalam tentang sejarah daerah dan meningkatkan pemahaman tentang kekayaan budaya lokal. Kombinasi Monumen Reyog dan Museum Peradaban di kawasan wisata Bukit Gamping menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, menggabungkan keindahan seni, perayaan budaya, dan pengetahuan sejarah. Hal ini menjadikan kawasan tersebut sebagai tujuan wisata menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin mengenal lebih dalam tentang kekayaan budaya Ponorogo (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, 2022).

## 1.6 LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan berbasis tempat dan inovasi kebijakan publik dari (Hambleton, 2009). Landasan teori dapat didasarkan pada studi dan literatur yang terkait dengan permasalahan inti yang akan dibahas dan diteliti.

### 1.6.1 Teori Kepemimpinan Berbasis Tempat dan Inovasi Kebijakan Publik

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin, memotivasi, dan memandu orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau jabatan seseorang dalam suatu struktur organisasi, tetapi juga tentang kemampuan untuk memengaruhi, menginspirasi, dan membimbing orang lain. Wewenang pemimpin merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola kegiatan serta anggota tim atau organisasinya. Wewenang ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk struktur organisasi, peraturan dan kebijakan. Hambleton (2009) menjelaskan bahwa awal perumusan kebijakan sebagai titik awal karya pemikiran terbagi menjadi dua fokus tema terkait, yaitu kepemimpinan yang baik memberikan inovasi dalam reformasi pelayanan publik dan kepemimpinan yang meliputi kebutuhan suatu tempat.

#### 1) Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Para pemimpin sektor publik berkesempatan menghadapi berbagai tantangan seperti resesi ekonomi yang parah, tekanan besar pada keuangan publik, dan dampak perubahan iklim. Semua tantangan ini telah meningkatkan kebutuhan akan inovasi dalam kebijakan publik. Peningkatan kapasitas organisasi dan tempat untuk berinovasi tidak boleh lagi dianggap sebagai ide bagus, melainkan menjadi suatu keharusan yang harus ada. Definisi inovasi adalah keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal ini dikarenakan inovasi tidak dapat diketahui sebelum-sebelumnya, karena inovasi merupakan suatu hal yang baru (Hambleton, 2009).

Inovasi dalam suatu kebijakan mampu memberikan perubahan baik atau berhasil dan juga perubahan yang gagal atau tidak berhasil. Bagi aktor yang mempunyai kepentingan yang berbeda, inovasi bisa memberikan manfaat yang nyata dan mampu memberikan perubahan yang optimal. Dalam teori (Hambleton, 2009) menjelaskan bahwa inovasi kebijakan publik didukung oleh suatu kejadian atau peristiwa yang mengharuskan inovasi kebijakan publik dilakukan. Berbagai

tekanan yang terjadi dapat mendorong inovasi kebijakan publik diimplementasikan oleh seorang pemimpin untuk mendapatkan pencapaian berbentuk suatu inovasi.

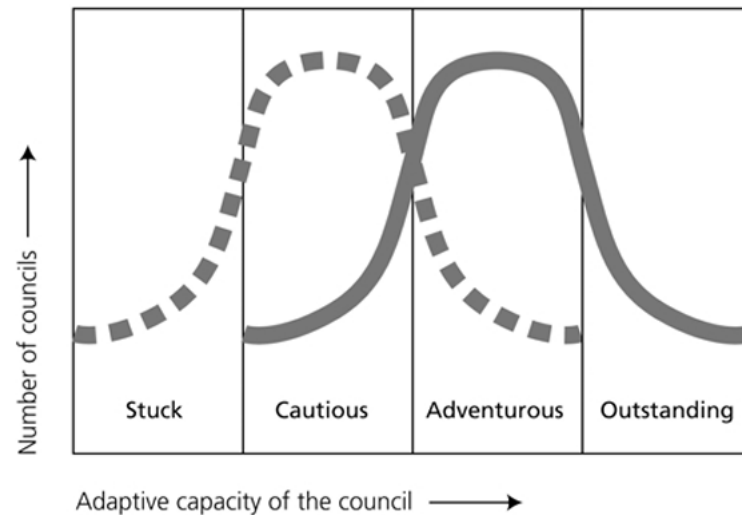
Suatu inovasi dapat terjadi karena berdasarkan kebutuhan untuk meninggalkan budaya kepemimpinan yang lama yaitu bersifat perintah dan kontrol, serta adaptasi atau kesesuaian pada target yang tidak perlu digunakan. Secara sederhana, untuk menumbuhkan budaya inovasi, para pemimpin daerah dapat memulai dengan metode baru dan meninggalkan metode lama. Dengan mencari kesesuaian dan mendorong perilaku pemecahan masalah yang melampaui batas untuk digunakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dari kepemimpinan dengan model penyesuaian harus dirubah dalam model kepemimpinan kinerja untuk memberikan perubahan besar bagi sikap pemimpin yang diterapkan.

Dalam suatu inovasi bisa dilihat bagaimana upayanya dalam reformasi kesesuaian mengenai tata kelola pemerintahan lokal melalui kurva inovasi. Dalam kurva tersebut bisa dilihat bagaimana kesiapan pemimpin dalam membuat gagasan atau inovasi kebijakan publik. Dalam kurva inovasi terdapat posisi atau masa yang menggambarkan kesiapan inovasi dari pemimpin, yaitu :

- a. “Terjebak” yaitu menggambarkan pemimpin yang paling belakang dan tidak memiliki kesiapan dalam menciptakan suatu inovasi kebijakan publik.
- b. “Waspada” merupakan pemimpin yang paling tidak ada inovasi
- c. “Petualang” merupakan posisi yang mengetahui kesiapan pemimpin yang mempunyai pandangan optimis dan mempunyai inovasi kepemimpinan yang siap untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan
- d. “Luar Biasa” merupakan posisi yang dialami oleh pemimpin mengenai kesiapan inovasi dengan posisi paling atas atau sudah mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan.

Adapun gambar kurva yang menggambarkan posisi berdasarkan masa kesiapan inovasi pemimpin dalam kebijakan publik :

Gambar 1.1 Kurva Inovasi 1998-2008



Dengan kurva inovasi di atas, sebuah inovasi bisa berhasil apabila mempunyai pemimpin yang menerima dan mendukung. Selain itu pendekatan terhadap kepemimpinan inovasi perlu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi para pemimpin. Dengan kurva inovasi dapat membantu para pemimpin untuk memperhitungkan kesiapan instansi yang berbeda. Dengan mempunyai inovasi yang berpandangan pada lingkup yang lebih luas dan kuat ke dalam suatu kebijakan publik.

## 2) **Kepemimpinan Berbasis Tempat atau Sipil**

Kepemimpinan yang berbasis tempat atau sipil dapat diartikan untuk melaksanakan semua aktivitas kepemimpinan yang melayani tujuan publik secara bersama. Sedangkan kepemimpinan sipil melaksanakan kekuasaannya dalam pengambilan keputusan yang memiliki kepedulian terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam suatu tempat.

Dari teori (Hambleton, 2009) menjelaskan bahwa kepemimpinan berbasis tempat merupakan suatu kepemimpinan kewarganegaraan yang dimana pengambilan keputusan dari suatu pemimpin berasal dari kepentingan suatu tempat tertentu bukan dari suatu kepentingan organisasi saja. Kepedulian pemimpin terhadap kepentingan suatu tempat atau wilayah memberikan jalinan ikatan sosial diantara kelompok-kelompok yang berlingkup pada lingkungan sosial yang berbeda.



Dalam menjalankan inovasi publik, perlu adanya peran-peran yang mampu menumbuhkan inovasi baru yang saling berkaitan dan menguntungkan. Berikut tiga jenis kepemimpinan sipil dapat dibedakan seperti yang ditunjukkan pada gambar :

Gambar 1.2 Kepemimpinan Sipil



Sumber : (Hambleton, 2009)

- a) *Political Leadership* : mengacu pada orang-orang yang terpilih untuk mengambil posisi pemimpin oleh warganya dan dinamakan sebagai pemimpin politik. Sebagai pemimpin politik akan memiliki cara pandang mengenai peran politik mereka dengan cara-cara yang berbeda.
- b) *Managerial Leadership* : merupakan suatu pekerjaan yang bertugas dalam wilayah pelimpahan wewenang oleh pemerintah daerah maupun pusat kepada pegawai negeri.
- c) *Community Leadership* : merupakan pekerjaan seseorang yang melingkupi suatu kegiatan dan memberikan waktu dan tenaga untuk kepemimpinan lokal seperti aktivitas komunitas, pemimpin bisnis dan lainnya.

Berdasarkan gambar di atas, area tumpang tindih antara bidang kepemimpinan yang berbeda dianggap sebagai zona inovasi dan merupakan area yang menyediakan banyak peluang untuk berinovasi. Peran-peran dalam gambar 1.1 tersebut merupakan peran penting yang dapat memberikan pengaruh kepada kepemimpinan sipil karena melibatkan perilaku kepemimpinan yang berada pada bidang gambar yang tumpang tindih.

Dalam teori Hambleton terdapat enam proposisi yang bisa digunakan untuk bahan diskusi penelitian dengan bentuk sebuah pernyataan. Enam proposisi ini bisa di dibantah, dipercaya dan dibuktikan benar atau salahnya berdasarkan dari data yang di dapatkan di lapangan penelitian. Enam proposisi ini yaitu sebagai berikut :

- a) Proposisi 1 : inovasi membutuhkan pergeseran dari pendekatan “kesesuaian” ke pendekatan “kinerja” dalam kepemimpinan.
- b) Proposisi 2 : para pemimpin yang menginspirasi inovasi yang berani dan efektif harus menyesuaikan pendekatan mereka dengan tingkat “kesiapan inovasi” yang mereka hadapi
- c) Proposisi 3 : para pemimpin layanan publik harus mengurangi “Inggris-Sentris” dan harus menanamkan pembelajaran dari luar negeri ke dalam praktik-praktik sehari mereka.
- d) Proposisi 4 : kepemimpinan berbasis masyarakat atau tempat melibatkan penyatuan para aktor dari tiga ranah kepemimpinan yang berbeda.
- e) Proposisi 5 : bidang-bidang yang tumpang tindih diantara berbagai bidang kepemimpinan- “zona inovasi”- memberikan peluang yang menjanjikan untuk terjadinya inovasi.
- f) Proposisi 6 : universitas-universitas di Inggris dapat menjadi pemain yang jauh lebih aktif dalam kepemimpinan sipil lokal dan khususnya dalam mempromosikan inovasi lokal

## **1.7 DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan kepemimpinan dan inovasi kebijakan publik di era Bupati Sugiri Sancoko dan Ipong Muchlisoni. Untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dianalisis melalui indikator-indikator tentang kebijakan kepemimpinan dan inovasi kebijakan publik berdasarkan dari teori yang dipakai.

Hambleton (2009) menjelaskan bahwa dari jurnal kebijakan kepemimpinan berbasis tempat dan inovasi kebijakan publik menjelaskan mengenai dasar awal kebijakan publik dengan mempunyai titik awal yaitu kepemimpinan berbasis tempat dan inovasi kebijakan publik dengan beberapa proposisi yang menjadi dasar pemikiran atau inisiatif dari pengimplementasian pihak birokrasi.

Kesuksesan suatu inovasi dapat tercapai ketika dipimpin oleh seseorang yang mau menerima dan memberikan dukungan. Selain itu, pendekatan terhadap kepemimpinan inovatif juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh para pemimpin. Penerapan kurva inovasi dapat membantu pemimpin dalam menilai kesiapan berbagai instansi. Dengan mengadopsi inovasi yang memiliki visi yang lebih luas dan kuat terhadap suatu kebijakan publik, dapat membawa dampak positif yang besar. Melalui inovasi, dapat diamati sejauh mana usaha dilakukan dalam melakukan reformasi terkait dengan penyesuaian tata kelola pemerintahan lokal melalui kurva inovasi. Pada kurva tersebut, dapat terlihat seberapa siap pemimpin dalam merumuskan ide atau inovasi kebijakan publik.

Berikut penjelasan mengenai tiga bentuk dari kepemimpinan sipil/tempat yang saling mempengaruhi satu sama lain :

- a) *Managerial Leadership* merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh seorang pemimpin dengan gaya otokratis, demokratis yang diimplementasikan di lingkup birokrasi. Dalam lingkup birokrasi tersebut kepemimpinan manajerial mempunyai peran penting untuk meningkatkan kinerja tugas karyawan, efektivitas karyawan dan kepuasan karyawan. Seorang pemimpin manajerial ini bertugas untuk mengarahkan, mengatur dan mengendalikan karyawan yang berada di struktur birokrasinya.
- b) *Political Leadership* yaitu suatu bentuk kepemimpinan yang memiliki kekuasaan dengan memiliki hubungan antara pihak yang berpengaruh dan yang dipengaruhi. Kepemimpinan politik berlangsung dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan dalam partai politik atau infrastruktur politik. Kepemimpinan politik mempunyai teknik berbeda dengan kepemimpinan manajerial yang diharuskan komunikasi dengan struktur vertikalnya menggunakan cara formal dan terstruktur dengan baik. Sedangkan dalam kepemimpinan politik ini lebih menggunakan cara komunikasi informal sehingga pemimpin politik tersebut bisa menggerakkan bawahannya dengan komunikasi personal dan fleksibel.
- c) *Community Leadership* merupakan bentuk kepemimpinan yang melibatkan kepentingan tidak hanya dari satu pihak saja, namun dalam menggunakan kewenangannya harus melibatkan pihak-pihak lain secara bersama. *Community Leadership* bertindak bersama dengan komunitasnya sehingga keterlibatan atau partisipasi dari anggota bisa terjalin baik dan bisa mengambil keputusan berdasarkan dengan sumberdaya anggota.

## **1.8 METODOLOGI PENELITIAN**

### **1.8.1 Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dengan mengeksplorasi suatu permasalahan atau fenomena yang dimana metode ini lebih umum digunakan aktor akademi terkait humaniora, agama, dan juga sosial (Darmalaksana, 2020). Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang mempunyai tujuan untuk bisa memahami kondisi pada konteks yang dimana penelitian ini mengarahkan pada pendeskripsian mengenai representasi suatu kondisi dengan penjelasan yang rinci. Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ialah karena pengkajian penelitian memuat tentang konteks yang alami (*natural setting*), dan dalam rangka memahami konteks tentang program yang terlaksana. (Nugrahani, 2014).

### **1.8.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk penelitian terkait fokus penelitian yang bisa diambil sebuah informasi maupun data yang diperlukan. Penelitian lokasi sangat penting bagi penelitian karena memiliki tujuan untuk mempermudah dan untuk kelancaran serta kejelasan mengenai sasaran yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo khususnya di kantor Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, kediaman atau sanggar kesenian reyog Ponorogo, kantor partai Nasdem dan kantor PDI Perjuangan. Pengambilan lokasi ini berdasarkan perlunya data yang akan diteliti berada di lokasi tersebut, selain itu juga guna mendukung dalam memperoleh data untuk mencapai tujuan penelitian ini.

### **1.8.3 Subjek/Informan Penelitian**

Pada penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Bupati Sugiri Sancoko dan Ipong Muchlisoni. Kedua subjek ini diambil karena memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengelola mengenai kebijakan pembangunan wisata di Kabupaten Ponorogo terutama budaya Reyog Ponorogo. Subjek penelitian kualitatif dipilih berdasarkan pertimbangan dengan memastikan bahwa pilihan subjek tersebut relevan dengan pertanyaan

penelitian yang ingin dijawab dan dapat memberikan wawasan mendalam dalam fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan ini dilakukan karena bagi peneliti informan dianggap paling mengetahui tentang program yang diteliti saat itu. Informan yang diambil ini mempunyai hubungan erat dengan masalah yang akan diteliti, sehingga kepemilikan informasi (data) sudah jelas dan valid.

Informan dalam penelitian ini akan diambil dari aktor yang berperan dalam keputusan pembangunan wisata di Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan budaya Reyog di masa kepemimpinan Ipong Muchlisoni dan Sugiri Sancoko. Informan penelitian merupakan orang yang mempunyai informasi yang bisa didapatkan untuk penelitian. Informan penelitian mempunyai data yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian ini. Alasan informan termasuk dari pemerintah birokrasi kabupaten Ponorogo adalah karena dalam kepemimpinan Bupati Ipong Muchlisoni dan Bupati Sugiri Sancoko instansi pemerintahan mempunyai peran dalam pengambilan keputusan maupun ikut dalam perancangan kebijakan yang berkaitan dengan wisata *local wisdom* di Ponorogo. Selain itu dari segi pelaku kegiatan budaya Reyog adalah karena program ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan target budaya Reyog terus lestari dan dijalankan oleh pelaku kesenian tersebut. Dengan menggali informasi kepada pelaku seni Reyog penulis bisa mengetahui bagaimana berjalannya budaya Reyog yang sebelumnya dijadikan kebijakan oleh Bupati Ponorogo tersebut.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah terpenting dan merupakan tujuan yang utama dalam penelitian. Metode pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang akan diteliti. Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan dengan jelas mengenai data yang diperoleh dan yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Dengan tiga teknik ini penelitian bisa mendapatkan hasil yang valid dan teruji.

##### **1.8.4.1 Wawancara**

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh informan dengan pewawancara dengan cara saling berinteraksi yang didalamnya terdapat kegiatan seperti sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, dan informasi. Sehingga dalam wawancara tidak hanya melakukan interaksi tanya jawab namun juga memiliki cakupan yang lebih luas untuk mendapatkan informasi (Sidiq & Choiri, 2019). Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada umumnya dilakukan dengan tanya jawab kepada informan secara tatap muka. Pada teknik ini, informan dengan pewawancara melakukan interaksi guna untuk mendapatkan informasi (data) yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti bisa memberikan pertanyaan yang bisa dirubah sewaktu-waktu baik saat wawancara dilakukan. Dalam teknik ini, peneliti bisa mengembangkan pertanyaan asalkan tetap berada di konteks yang sesuai dengan pertanyaan awal. Wawancara semi terstruktur lebih memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali informasi yang didapat dari informan. Peneliti bisa menggali lebih luas terkait dengan penelitian kebijakan pembangunan wisata *local wisdom* dalam kepemimpinan Bupati Sugiri dan Ipong Muchlisoni. Saat wawancara dilakukan, peneliti menggunakan alat bantu *tape recorder* untuk merekam hasil pembicaraan saat wawancara dengan informan tersebut.

#### **1.8.4.2 Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi bisa dilakukan dengan perolehan data dari dokumen bisa berupa arsip milik pemerintah terkait, foto, video, pengumuman, pernyataan tertulis tentang kebijakan tertentu, dan juga bahan tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi bisa dilakukan dengan mengakses data tentang kebijakan tertulis tentang pembangunan wisata *local wisdom* di Ponorogo dalam kepemimpinan Bupati Sugiri dan Ipong. Dokumentasi yang dilakukan nantinya bisa diperoleh dengan merekam data tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan wisata *local wisdom* di Ponorogo, mulai dari era kepemimpinan Ipong Muchlisoni sampai dengan kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.

## 1.8.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian perlu adanya analisis data dengan tujuan agar penelitian ini dapat terlaksana dengan efektif. Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data kali ini merupakan metode menurut Miles *et.al.*, (2014) dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*, yang dalam buku ini meliputi metode tentang kondensasi data, penyajian data, dan juga penarikan dan verifikasi kesimpulan.

### 1.8.5.1 Data Condensation (Kondensasi Data)

Kondensasi data bisa dipahami sebagai proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan juga pengubahan catatan di lapangan, data dari transkrip wawancara, dokumentasi dan juga data empiris. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang dilakukan langsung terhadap pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara kebijakan, selain mengambil data dari pemerintahan, penelitian ini juga akan mencari data dari masyarakat yang tergabung dalam kesenian Reyog Ponorogo. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kali ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana berjalannya kebijakan pembangunan wisata *local wisdom* di Ponorogo terlaksana.

### 1.8.5.2 Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data disajikan agar bisa membantu atau memudahkan penulis sehingga bisa memahami permasalahan yang ada dan sehingga bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Data yang disajikan bisa berupa deskripsi, bagan, grafik, dan lainnya. Setelah data-data tentang kebijakan pembangunan wisata *local wisdom* didapatkan, dan mengetahui aktor-aktor yang terlibat maka langkah selanjutnya adalah menyusun hasil dari wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang kemudian dibahas secara rinci.

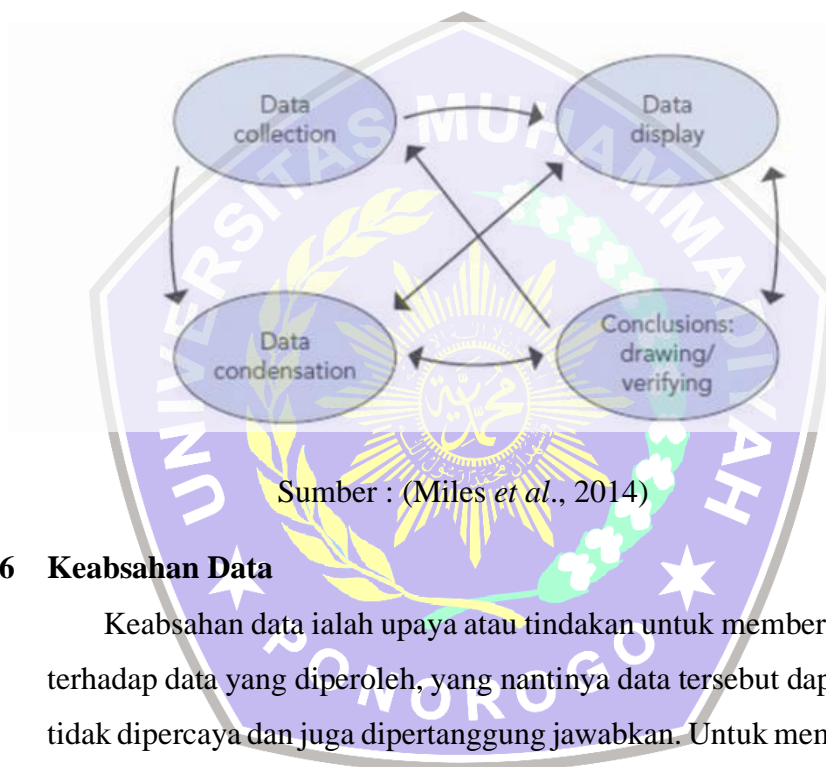
### 1.8.5.3 Drawing and Verifying Conclusions (Pengambilan dan Memverifikasi Kesimpulan)

Langkah terakhir setelah kondensasi data dan juga data-data disajikan dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Di metode ini, peneliti menafsirkan hasil dari penelitiannya dan selanjutnya disajikan dengan bahasa yang lebih ringkas, padat dan mudah difahami. Setelah mencari data mengenai kebijakan pembangunan wisata *local wisdom* di Ponorogo saat era kepemimpinan Bupati Sugiri dan Ipong Muchlisoni,

aktor-aktor yang terlibat penting dalam program ini maka kesimpulan dipaparkan mengenai bagaimana kebijakan tersebut telaksana, bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap program pembangunan wisata, dan lain sebagainya (Miles *et al.*, 2014).

Dengan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa analisis data terdiri dari beberapa tahapan yang dilaksanakan. Tahapan tersebut dilakukan dalam proses penelitian dengan tujuan tertentu. Proses atau tahapan analisis digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 : Metode Analisis Data



Sumber : (Miles *et al.*, 2014)

### 1.8.6 Keabsahan Data

Keabsahan data ialah upaya atau tindakan untuk memberikan kepercayaan terhadap data yang diperoleh, yang nantinya data tersebut dapat dipercaya atau tidak dipercaya dan juga dipertanggung jawabkan. Untuk memberikan validitas data yang optimal, maka perlunya dilakukan uji keabsahan pada data.

Pada penelitian ini keabsahan data akan diuji dengan teknik Triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas triangulasi diartikan sebagai pengecekan data yang berasal dari beberapa sumber informasi/data. Triangulasi dilakukan agar validitas data lebih terpercaya karena dengan pengujian data ini penelitian bisa lebih konkret dan terverifikasi. Pengujian data dengan teknik triangulasi dilakukan dengan pengujian data yang kemudian data tersebut dibandingkan atau dinilai dari hasil wawancara atau objek tertentu yang bersangkutan. Tipe triangulasi dikemukakan oleh Denzin (1978) bahwa triangulasi memiliki empat



hal, yaitu triangulasi antar penelitian, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data (Denzin, 1978).

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik ini menggunakan triangulasi metode yang dimana informasi itu dibandingkan dengan cara-cara yang berbeda. Dengan teknik ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode-metode pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Metode ini digunakan sebagai bahan pengumpulan informasi yang valid dan kredibel.

